

**Dinamika Media Massa Lokal dalam Membangun
Demokratisasi di Daerah
Eko Harry Susanto, M.Si
Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara
Jl. Letjen S.Parman No.1 Jakarta 11440
HP.0818126750 / ekohs@centrin.net.id**

Abstract

Information freedom is supported by various rules that give media discretion to spread news to people. But the needs of informations in our society are vary, thus, it's too hard for national mass media to disseminate appropriate and proportional information which meet the needs of the people in local society. There fore, local media tries to cover the gap can not be covered completely by national mass media. It seems, this condition develops the awareness about the importance of informations. Actually local media still faces various profesionalism, institutional, fund availability and democratization problem. Hence, with all the limitation of local media that carries out the function of reporting an broadcasting which do not fulfil the needs of information in local society.

Keywords: Local Mass Media, Freedom Of Information and Democratization

Abstrak

Kebebasan informasi didukung oleh berbagai peraturan yang memberikan keleluasaan media untuk menyebarkan pesan kepada khalayak. Namun kebutuhan informasi masyarakat, juga semakin beragam, sehingga terlampau sulit bagi media massa nasional, untuk memberikan informasi yang sesuai dan proporsional dengan kebutuhan khalayak di daerah. Karena itu, media lokal berupaya untuk mengisi celah yang tidak bisa diisi sepenuhnya oleh media massa yang mempunyai kemampuan jangkauan penyebaran berita lebih luas. Sepintas, kondisi ini menyuburkan kesadaran terhadap pentingnya informasi. Namun di balik itu, ternyata media lokal, masih menghadapi berbagai problem profesionalisme, kelembagaan, ketersediaan modal dan demokrasi. Akibatnya, dengan segala keterbatasannya,

media lokal menjalankan fungsi pemberitaan maupun penyiaran tidak sesuai harapan khalayak di daerah.

Kata Kunci : Media Massa Lokal, Kebebasan Informasi dan Demokratisasi

Pendahuluan.

Reformasi politik tahun 1998, berdampak terhadap tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Informasi publik yang semula menjadi kekuasaan pemerintah, karena dikelola secara ketat oleh manajemen komunikasi pemegang kekuasaan, semakin pudar sejalan dengan eksistensi transparansi dan demokratisasi semua bidang kehidupan. Namun persoalannya, kebebasan komunikasi sebagai salah tuntutan perubahan, belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan informasi yang diperlukan masyarakat. Sebab, dinamika komunikasi dalam bingkai kebebasan, justru terperangkap oleh pemahaman dan tindakan yang tidak menghiraukan lagi nilai keberadaban dalam hubungan antar entitas yang tumbuh di lingkungan masyarakat majemuk.

Salah satu problem kebebasan komunikasi dan informasi adalah peran media massa, yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi universal, yang menjunjung tinggi etika pemberitaan dalam menjalankan fungsi media. Sebagai pendukung utama pilar perubahan ke arah yang lebih baik, media massa konvensional atau media mainstream, diharapkan memberikan wawasan yang lebih luas dan pembelajaran, tentang perlunya hidup berdampingan diantara berbagai kelompok, demi kesejahteraan bersama. Karena itu, keleluasaan yang dinikmati oleh media massa, harus diarahkan pada jalur yang benar sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan bermanfaat dalam membangun masyarakat informasi, sebagaimana yang ditegaskan dalam berbagai regulasi tentang media.

Berdasarkan Pernyataan Umum Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa – Bangsa, “ setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun dan dengan tidak memandang batas – batas” (Asasi, Juni 1999). Dengan kata lain, bahwa kebebasan komunikasi merupakan hak yang melekat pada setiap individu, dan tidak bisa dibatasi dengan berbagai ketentuan yang menghambat.

Sedangkan dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 28F, disebutkan : “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,

meperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Pada perkembangannya, media massa sebagai saluran informasi yang dibutuhkan masyarakat, mengalami perkembangan pesat dalam upaya memenuhi kebutuhan informasi khalayak. Dari aspek kecepatan, dan kualitas pemberitaan yang berpijak kepada transparansi, media massa menjadi sumber pesan yang dipakai sebagai rujukan masyarakat.

Namun sejalan dengan eksistensi otonomi daerah, yang mendorong menguatnya pemerintahan di daerah, maka kebutuhan informasi yang berasal dari media massa di pusat kekuasaan dinilai tidak mampu lagi memberikan informasi yang sepadan dengan kebutuhan khalayak di daerah. Ada sejumlah kebutughan pemberitaan spesifik, seperti berita politik yang menyoroti dinamika pemerintahan maupun hiburan yang bersumber dari budaya setempat. Ini sejalan dengan pendapat Hamzah (2001:7), media tidak boleh lepas dari konteks sosial dan kebudayaan yang dikehendaki oleh khalayak – pembaca, pendengar, dan penonton.

Pada konteks ini, jelas media massa nasional yang ada di pusat kekuasaan dan diposisikan sebagai untuk rujukan, tidak bisa diharapkan untuk memberikan informasi yang berbasis kepada kebutuhan masyarakat setempat. Berdasarkan survei Serikat Penerbit Surat Kabar, sebagaimana yang tertera dalam Media Planning Guide (2008: 57), media cetak, terdiri dari surat kabar harian maupun tabloid yang terbit di Jakarta dan Pulau Jawa, berjumlah 182 media, atau sekitar 37 %. Sedangkan 63 % lainnya, tersebar di luar Pulau Jawa.

Sementara itu, televisi swasta yang memiliki jangkauan siaran nasional, meskipun unggul dalam menarik pemirsa, tetapi program tayangan televisi lokal dari JTV Surabaya dan Riau TV mampu menarik khalayak di daerah. Jumlah keseluruhan stasiun televisi lokal, yang beroperasi adalah 104 buah tersebar di seluruh Indonesia. (Media Planning Guide,2008: 433).

Dengan kondisi semacam ini, hakikatnya media massa lokal berupaya memberikan informasi yang dibutuhkan oleh khalayak daerah secara spesifik. Jadi sesungguhnya, media massa lokal, cetak maupun elektronik dalam menjalankan fungsi media, tidak ada perbedaan dengan media nasional.

Kendati demikian, mengingat berbagai keterbatasan, bukan berarti media massa lokal, bisa dengan bebas mencari atau mengeksplorasi berita yang tidak faktual. Sebab, berbagai regulasi menegaskan perlunya menjalankan transparansi dan demokrasi informasi, dengan tetap menjalankan beragam fungsi media massa yang mendidik dan mencerdaskan khalayak. Untuk melihat dinamika media massa di daerah, maka penelitian ini memfokuskan kepada pemberitaan tentang media lokal di media on-line populer yang mudah diakses oleh khalayak.

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, dengan menitikberatkan kepada analisis isi kualitatif. Menurut Subiyakto (dalam Suyanto dan Sutinah, 2008:125), “analisis isi terbagi dalam dua aliran metodologi yaitu kualitatif dan kuantitatif”. Kuantitatif berpedoman kepada filsafat positivisme, sedangkan kualitatif menggunakan pendekatan interpretatif. Analisis isi merupakan teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara obyektif dan sistematis (Holsti dalam Moleong, 2009: 220). Secara substantif, analisis isi kualitatif ditujukan untuk memahami konteks pragmatik melihat hubungan satu pernyataan dengan pernyataan lain dalam kondisi tertentu (Jebarus, 2011 : 32)

Obyek penelitian ini adalah berita seputar dinamika pers lokal di media on-line Kompas.com pada tahun 2008-2011. Media on-line yang didukung oleh internet, hakikatnya dapat dimanfaatkan dalam riset komunikasi (Rubin, Rubin and Piele, 2005 : 15). Berdasarkan pengamatan terhadap teks yang terdapat dalam Kompas.com tahun 2010, terdapat 21 berita tentang pers lokal di Kompas.com. Dari seluruh berita tersebut, diambil secara purposive tiga berita yang dikelompokkan dalam (1) kekritisian media lokal terhadap jalannya pemerintahan yang mencakup 10 berita, (2) konflik antara wartawan media lokal dengan pejabat/ masyarakat terdiri dari 8 berita dan (3) Demokratisasi dalam pemerintahan local terdiri dari 3 berita. Penetapan berita – berita tersebut merujuk kepada struktur analisis isi kualitatif yang terkait dengan pemilihan isi berita tertentu sesuai dengan kepentingan penelitian (McQuail,2010: 365)

Alasan menggunakan media online Kompas.com, didasarkan pada posisi Kompas edisi cetak, yang memiliki hubungan langsung dalam kelembagaan. Harian Kompas edisi cetak merupakan media independen yang memiliki tiras paling tinggi dan memiliki pengaruh kuat secara nasional dalam kehidupan bernegara. Berdasarkan survei, Kompas.com termasuk 20 situs yang sering dikunjungi oleh pengguna internet di Indonesia (Kompas, 16 Juni 2011).

Dalam penelitian ini, ditetapkan 1 (satu) berita secara purposif berhubungan dengan topik yang telah ditetapkan dan memperhatikan aspek yang memenuhi kelengkapan berita. Rentang waktu yang ditetapkan, dari tahun 2008 sampai dengan 2011, dengan alasan pada tahun tersebut terjadi berbagai kasus yang menyangkut problem media massa lokal.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan ketentuan yang tercakup dalam karakter pemberitaan, maka ditetapkan 3 (tiga) berita yang mewakili kompleksitas media dalam penyelenggaraan demokrasi di daerah yaitu, Kebebasan Informasi dan Kekritisian Media Lokal, Konflik Antara

wartawan dengan Pejabat, dan Demokratisasi Bernegara sebagaimana yang tampak dalam rincian berita di Kompas.com

1. Kategori : Kebebasan Informasi dan Kekritisan Media Lokal
 Judul Berita : “Korban Kekerasan, Jurnalis Mengadu ke DPR” (10 Mei 2011)
 Deskripsi : Seorang jurnalis kontributor Vivanews, *Harian Lokal Bintang Papua* dan *The Jakarta Globe*, Banjir Ambarita (Bram), mengadukan tindakan kekerasan yang dialaminya kepada Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Gedung DPR, Jakarta. Bram ditusuk oleh pelaku yang diduga oknum polisi di Jayapura, Papua. Bram, menceritakan, ia menduga kuat penikaman yang diterimanya terkait berita investigasi tentang oknum polisi yang melakukan pemerkosaan terhadap seorang tahanan wanita di Rumah Tahanan Jayapura. Peristiwa tersebut dirahasiakan polisi dari publik dan keluarga wanita itu.

(<http://nasional.kompas.com/read/2011/05/10/20363972/Korban.Kekerasan.Jurnalis.Mengadu.ke.DPR> (akses 18 Mei 2011))

2. Kategori : Konflik Antara wartawan dengan Pejabat
 Judul Berita : “Bupati Manggarai Barat Bantah Dalangi Tindak Kekerasan terhadap Wartawan” (17 Februari 2008)
 Deskripsi : Bupati Manggarai Barat, membantah keras tudingan yang menyatakan bahwa pihaknya telah mendalangi kasus penganiayaan wartawan Pos Kupang, Yacobus Lewanmeru, di Labuan Bajo (kota kabupaten), Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur.

(<http://nasional.kompas.com/read/2011/05/10/20363972/Korban.Kekerasan.Jurnalis.Mengadu.ke.DPR> (akses 13 April 2011))

3. Kategori : Demokratisasi Bernegara
 Judul Berita : “Dekati Pers, Kalla Kunjungi Redaksi Koran Lokal” (21 Juni 2009)
 Deskripsi : Kunjungan Kalla ke kantor redaksi media lokal disebut-sebut bagian dari pendekatan ke sejumlah pimpinan redaksi lokal menjelang pemilu presiden dan wapres, 8 Juli mendatang. Selain juga Kalla ingin mengetahui cara kerja media lokal menyampaikan pemberitaan. Setelah ke Gedung Suara Merdeka, Kalla dijadwalkan akan menemui pimpinan dan jajaran redaksi Solo Pos di Kota Solo, pada sore harinya.

<http://nasional.kompas.com/read/2009/06/21/1058034/Dekati.Pers..Kalla.Kunjungi.Redaksi.Koran.Lokal> (akses 7 April 2011)

Tiga berita tersebut, merepresentasikan tentang kekritisan media lokal, yang didukung oleh peraturan, konflik pekerja pers dengan elite dalam kekuasaan di daerah yang dipicu oleh kebebasan informasi, dan keberadaan pers lokal dalam demokrasi bernegara, yang seringkali dipakai sebagai instrumen politik untuk mempengaruhi massa.

Kebebasan Informasi dan Kekritisan Media Lokal

Upaya media massa melakukan kritik terhadap kondisi pemerintahan di daerah, sesungguhnya terkait dengan fungsi media di tengah khalayak yang beragam. Media massa berperan dalam penyebaran informasi yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Craft, Light dan Godfrey.2001 (2001:6), menegaskan “ fungsi media massa dapat dikelompokkan menjadi empat kategori umum, yaitu informasi, hiburan, persuasi dan bisnis” . Dari empat hal itu, informasi adalah hal yang paling penting bagi khalayak. Disamping itu, media telah menjadi sumber yang dominan bukan saja bagi individu untuk memperoleh gambaran dari citra realitas sosial, tetapi juga bagi masyarakat dan kelompok secara kolektif. (Novianti, 2010:169)

Pemberitaan media lokal tentang kekritisan terhadap pemerintah daerah tampak seperti berita dalam Kompas.com, tanggal 10 Mei 2011 “Korban Kekerasan, Jurnalis Mengadu ke DPR.” Pada intinya menginformasikan bahwa Seorang jurnalis kontributor Vivanews, *Harian Lokal Bintang Papua* dan *The Jakarta Globe*, Banjir Ambarita (Bram), mengadukan tindakan kekerasan yang dialaminya kepada Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Gedung DPR, Jakarta. Bram ditusuk oleh pelaku yang diduga oknum polisi di Jayapura, Papua.

Berdasarkan berita tersebut, media lokal menunjukkan perhatiannya terhadap jalannya pemerintahan di daerah. Informasi kekerasan terhadap wartawan akibat memberitakan perilaku aparat yang tidak bertanggungjawab, merupakan upaya media massa lokal menggambarkan realitas faktual tanpa reduksi atau penambahan untuk kepentingan kelompok. Media lokal benar – benar menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan lokal.

Namun bisa saja dalam kondisi tertentu, media lokal, tidak menjalankan realitas faktual ketika mengikuti atau tunduk terhadap sistem kekuasaan yang ada di daerah tempat media tersebut beroperasi. Artinya, ketika media lokal lebih mementingkan untuk mendukung pemerintahan di daerah atau menempatkan diri sebagai instrumen politik pmda, maka sulit untuk memiliki independensi dalam pemberitaan.

Secara umum, berdasarkan UU No. 40/1999 tentang Pers tidak mengenal media massa lokal. Namun dalam UU No.32/ 2002 tentang Penyiaran, terdapat lembaga penyiaran publik yang terdiri dari Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia, yang beroperasi di daerah. Lembaga ini wajib independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan sosial untuk kepentingan masyarakat.

Dua peraturan tersebut, memberikan pedoman bahwa media wajib memberikan informasi transparansi dan independen. Dalam situasi perubahan politik di daerah, yang berjalan linier dengan dinamika politik nasional, kekuasaan pemerintahan di daerah tidak bisa menjadi pengendali informasi atau menempatkan media massa lokal sebagai instrumen politik pemerintah daerah.

Meskipun demikian, ternyata masih saja muncul korban kekerasan terhadap jurnalis yang berkaitan dengan transparan pemberitaan. Sebagaimana menurut Bram (korban/ jurnalis), bahwa ia menduga kuat penikaman yang diterimanya terkait berita investigasi tentang oknum polisi yang melakukan pemerkosaan terhadap seorang tahanan wanita di Rumah Tahanan Jayapura. Peristiwa tersebut dirahasiakan polisi dari publik dan keluarga wanita itu. Kasus ini, menunjukkan bahwa sejumlah entitas dalam pemerintahan tidak dapat menerima pemberitaan yang transparan menyangkut tindakan pemegang kekuasaan di daerah.

Padahal hak atas informasi adalah hak dasar yang melekat dalam diri manusia. Bill Kovach dan Tom Rosenthal menyebutkan sebagai naluri kesadaran manusia untuk mengetahui hal-hal diluar dirinya. Hak ini diakui dalam pasal 19 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia yang disahkan tahun 1948. Untuk itu, hak atas informasi harus terus dijaga dan diperjuangkan termasuk jika menghadapi manipulasi yang dilakukan oleh para pebisnis maupun pejabat pemerintah dan politisi. (Haryanto, 2010:7)

Di era reformasi politik, hak atas informasi dan kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat, yang berasaskan prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum. Media massa lokal sebagai saluran informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial harus bertanggungjawab terhadap diri sendiri dan khalayak. Sebab, UU No.40/ 1999 tidak mengenal sensor, dan pembredelan atau pelanggaran penyiaran. Jadi media massa harus memiliki sensitivitas terhadap berita yang akan disiarkan kepada khalayak. Namun sebagaimana dalam berita tentang jurnalis korban kekerasan yang mengadu ke DPR, media lokal harus mampu menempatkan dalam posisi yang independen. Sebab, meskipun tidak ada sensor, tetapi masyarakat ternyata masih belum bisa menerima kebebasan pers. Bukan berarti media lokal harus tunduk terhadap kekuatan aparat negara, tetapi harus memiliki kemandirian dalam pemberitaan.

Ketentuan tidak ada sensor, tentu saja tidak sebatas kepada media cetak tetapi juga menyangkut media penyiaran. Menurut Undang – Undang Nomor 32/ 2002, lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya berpedoman pada peraturan perundang – undang yang berlaku. Penyiaran diarahkan, antara lain untuk menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai – nilai agama serta jati diri bangsa, menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa.

Oleh sebab itu, kekritisian media lokal yang berujung kepada penganiayaan wartawan, tidak sejalan dengan prinsip yang terdapat dalam Undang – Undang Pers maupun UU Penyiaran yang memberikan perlindungan terhadap dinamika media massa lokal.

Konflik Media Lokal Versus Kekuasaan

Diberlakukannya UU No. 40/1999 dan UU No.32/2002, yang memberikan keleluasaan penerbitan dan penyiaran, mendorong tumbuhnya media lokal yang sangat pesat. Pada satu sisi, media lokal mampu mendukung demokratisasi dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah. Namun di sisi lain, media lokal disinyalir tidak menjalankan fungsi media sesuai dengan ketentuan, sehingga merugikan masyarakat yang mengharap informasi berimbang.

Implikasinya, tidak semua berita diterima dengan baik oleh khalayak sebagaimana pemberitaan Kompas.com, pada 17 Februari 2008 mengenai “Bupati Manggarai Barat Bantah Dalangi Tindak Kekerasan terhadap Wartawan.” Pada intinya, Bupati Manggarai Barat membantah keras, bahwa pihaknya telah mendalangi kasus penganiayaan wartawan Pos Kupang, Yacobus Lewanmeru, di Labuan Bajo (kota kabupaten), Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur.

Penganiayaan terhadap wartawan oleh aparat biasanya dipicu oleh ketidaksenangan terhadap berita. Padahal disisi lain, media lokal yang berupaya menjalankan fungsi sesuai dengan tuntutan demokratisasi dalam pemerintahan lokal yang memiliki hak, wewenang dan kewajiban mengatur pemerintahan kepentingan masyarakat setempat setempat.

Kompleksitas tugas pemerintahan daerah, tidak mungkin bisa dijalankan aparat pemerintah daerah beserta sayap kekuasaannya, tanpa didukung oleh peran media massa lokal yang menjalankan pemberitaan dengan baik. Namun keberadaan media lokal, sebagai antisipasi dari ketidakmampuan media nasional yang menyediakan

ruang memadai untuk berita daerah, tidak selalu berjalan seiring dengan kekuasaan di daerah, elite dan masyarakat. Sebab, yang terjadi justru, media lokal terkait konflik dengan aparat pemerintah daerah dan masyarakat. Terlepas dari pihak mana yang tidak mematuhi ketentuan dalam UU No.40/1999 atau UU No.32/ 2002, tetapi faktanya konflik yang melibatkan media dengan pemerintah daerah, pemilik otoritas di daerah dan masyarakat pada umumnya masih terus terjadi.

Secara empirik, perbedaan persepsi dan kepentingan masyarakat dan media, tidak bisa lepas dari perjalanan pers di Indonesia (Sudibyo, 2009). Sebelum reformasi politik tahun 1998, ada kecenderungan menggunakan Teori Media Pembangunan yang mengeksplorasi keserasian dalam kehidupan bermasyarakat (McQuail, 1991:119). Bagi kepentingan tujuan pembangunan, negara memiliki hak untuk campur tangan, atau membatasi, pengoperasian media, sarana penyensoran, subsidi, dan pengendalian langsung terhadap media. Pola media pembangunan ini lazim digunakan di negara – negara yang sedang berkembang. (Jayaweera dan Amunugama, 1987 : 42).

Dalam bingkai pers pembangunan yang memberikan kebebasan semu terhadap jurnalis, semua informasi yang didifusikan oleh media, telah melalui proses pengawasan berlapis, sehingga berita yang muncul sesuai dengan kehendak pemegang kekuasaan. Dampaknya, berita yang mengungkap tentang sisi gelap peristiwa di masyarakat, tidak pernah muncul di media. Pemberitaan ditekankan untuk menjaga situasi harmoni dalam perspektif integralistik, serasi, selaras, seimbang sebagaimana jargon yang sering dieksplorasi para elite. Karena itu, sekalipun sekelompok masyarakat tidak puas, mereka sulit untuk menyuarakan pendapatnya.

Berdasarkan hal tersebut, masyarakat, terlebih elite dalam pemerintahan dan masyarakat, terbiasa dalam lingkaran pemberitaan yang datar tanpa gejolak. Karena itu, ketika reformasi politik membuka peluang munculnya pers bebas di daerah, sejumlah entitas yang semula memperoleh perlindungan ”manajemen pemberitaan pemerintah”, merasa tidak nyaman dan mengeksplorasi tuduhan, bahwa pers era reformasi kebablasan dan berpotensi memicu munculnya konflik. Memang ada sejumlah media yang terlampaui bebas, dan tidak menghiraukan kode etik jurnalistik, tetapi transparansi informasi setidak – tidaknya membawa berbagai perubahan yang signifikan dalam kehidupan bernegara yang demokratis.

Hakikatnya, era kebebasan pers yang telah dinikmati oleh masyarakat, tetap berpotensi menimbulkan konflik antara media lokal dengan kekuasaan pemerintahan di daerah maupun masyarakat lokal. Ini disebabkan pada satu pihak, aparat pemerintah daerah. Ini disebabkan masih memosisikan sebagai pemegang kekuasaan termasuk dalam mengendalikan informasi. Sedangkan media lokal berupaya

menjalankan fungsi profesionalisme dalam memberikan informasi faktual kepada khalayak.

Demokrasi Dalam Pemerintahan

Membangun keberadaban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, merupakan salah satu faktor yang menjadi tujuan ideal media massa. Salah satu penanda keberadaban adalah kebebasan. Mac Bride (1980 : 46) menyatakan bahwa kebebasan adalah syarat demokrasi yang paling berharga, biasanya diperoleh melalui perjuangan yang sulit melawan kekuatan ekonomi , politik dan penguasa dengan banyak pengorbanan, bahkan jiwa sekaligus. Dengan demikian kebebasan merupakan penjaga demokrasi yang ampuh.

Demokrasi menyangkut proses dimana individu sebagai partner yang aktif bukan hanya sebagai objek komunikasi saja, tetapi membentuk keanekaragaman pesan. Masalahnya makna demokrasi seringkali direduksi oleh kepentingan kelompok dengan menerapkannya secara integralistik sesuai kepentingan. Karena itu, ketika reformasi politik memberikan kebebasan kepada media lokal dalam fungsi penyampaian pesan, para elite terperangkap dalam upaya penafsiran sepihak sesuai kehendaknya.

Mencermati kekuatan media lokal di era reformasi, elite politik dan kekuasaan negara, berupaya melakukan pendekatan kepada pers. Sebab, tanpa dukungan pers, mereka tidak bisa dikenal secara luas dan tidak mendapat dukungan dari masyarakat di daerah. Berita Kompas.com, 21 Juni 2009 dengan judul “Dekati Pers, Kalla Kunjungi Redaksi Koran Lokal”. Dalam kunjungan Kalla ke kantor redaksi media lokal disebut-sebut bagian dari pendekatan ke sejumlah pimpinan redaksi lokal menjelang Pemilu Presiden dan Wapres, 8 Juli 2009. Kalla ingin mengetahui cara kerja media lokal dalam menyampaikan pemberitaan. Setelah ke Gedung Suara Merdeka, Kalla dijadwalkan akan menemui pimpinan dan jajaran redaksi Solo Pos di Kota Solo, pada sore harinya. Berita ini menunjukkan, bahwa dalam demokrasi informasi, pemegang kekuasaan memerlukan peran media lokal.

Hal ini sejalan dengan pendapat Gordon dkk (dalam Priest 2010:68) bahwa “liputan media massa memiliki rekam jejak yang terbukti untuk menjadi kontributor penting dalam memahami masyarakat dan tindakan.” Dengan kata lain, media massa membawa pesan yang bermanfaat bagi masyarakat dalam menghadapi berbagai permasalahan isu.

Tidak bisa diabaikan, ketika regulasi media massa memberikan kebebasan, menangkalkan pemberitaan kolusif, elite tidak bisa menggunakan media untuk kepentingan politik. Sebab pers sudah memiliki kemandirian dalam menyuarakan pentingnya transparansi dan demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun persoalannya, tidak semua elite dalam pemerintahan di daerah dapat menerima demokrasi dan kebebasan informasi. Seperti mengikuti pendapat

Lippman(dalam Delia, 1987 : 28), berpendapat “ demokrasi berbahaya bagi pemerintahan otoriter, sebab agen – agen komunikasi massa modern, membentuk kelompok sosial yang berpengetahuan dan berakar pada realita. Mengingat demokrasi mengancam eksistensi penguasa, maka diberlakukan sensor yang sangat ketat terhadap media massa, agar tidak mengeksplorasi pesan – pesan yang mengganggu jalannya pemerintahan.

Namun sejalan dengan perubahan politik, kontrol terhadap media sudah tidak ada, walaupun pada satu sisi belum bisa menerima kebebasan dan keterbukaan informasi, mengingat kendala kultural, etnosentrisme dan semangat sektarian. Selain itu, kekuasaan pemerintahan di daerah masih sulit menerima pers bebas. Ini bisa dimaklumi mengingat, elite dalam birokrasi pemerintahan di daerah sudah terbiasa menikmati berbagai keistimewaan sebagai pemegang otoritas informasi yang dilindungi oleh peraturan.

Terlepas dari sikap kelompok dan pemerintah yang tidak mendukung transparansi, media massa lokal. Juga belum sepenuhnya mampu menjalankan pers bebas yang tidak memihak, transparan dan faktual, mengingat sejumlah keterbatasan dalam pendanaan dan profesionalisme jurnalis. Akibatnya, media lokal terperangkap oleh jerat ambiguitas pemberitaan. Pada satu sisi menginginkan pemberitaan berkualitas dengan menjaga independensi, tetapi pada sisi lainnya, tidak bisa melepaskan ketergantungan pendanaan dari pemegang kekuasaan politik dan ekonomi, yang bisa mempengaruhi jalannya pemerintahan di daerah.

Kalaupun secara legal formal, media juga menjalankan fungsi bisnis, tetapi harus mengedepankan informasi yang transparan kepada khalayak. Jadi ada keseimbangan antara ideologi media untuk menjalankan fungsi pemberitaan dan penyiaran yang berpijak kepada kepentingan publik dan orientasi bisnis media.

Harapan Terhadap Peran Media Lokal

Selain terkait dengan kebebasan informasi, konflik, dan demokratisasi, media lokal juga berupaya mengapresiasi harapan masyarakat terhadap peran yang dijalankan. Khususnya dalam menjaga independensi dan transparansi informasi demi menunjukkan demokratisasi di daerah.

Tidak bisa diabaikan, sejalan dengan menguatnya otonomi daerah, peran media lokal semakin nyata dalam mendukung jalannya pemerintahan di daerah. Kendati demikian, hubungan antara media lokal dengan pemerintah daerah tidak selalu berjalan dengan baik. Sebab terjadi upaya mengesampingkan regulasi tentang pers dan penyiaran yang seharusnya menjadi prinsip dalam menjalankan fungsi media lokal.

Terlampau banyak masalah yang disinyalir sebagai bentuk penyimpangan dari fungsi media daerah. Tetapi sumber dari semua persoalan tampaknya menyangkut

dana pendukung keberlangsungan hidup media. Dengan kata lain, faktor keuangan memegang peran penting. Agar media mampu menjalankan prinsip independensi dan transparansi pemberitaan. Sebab penjualan oplah media, tidak mungkin mampu menutupi biaya operasional. Demikian juga yang terjadi televisi lokal, untuk memproduksi berita daerah yang sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal memerlukan dana. Sedangkan biaya yang memadai sulit untuk dipenuhi oleh media massa daerah yang memiliki problem keuangan. Sebagaimana dalam Kompas.com 20 Januari 2011, “Upah Jurnalis di Surabaya Belum Layak” Hasil survei Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya belum layak. Kondisi ini berpotensi, melemahkan idealisme wartawan.

(<http://regional.kompas.com/read/2011/01/20/21375656/Upah.Jurnalis.di.Surabaya.Belum.Layak> (akses 10 April 2011).

Implikasinya, media memiliki ketergantungan terhadap mereka yang mempunyai kekuatan dana, seperti pemerintah daerah dan para pemilik modal di daerah. Pola semacam ini mengakibatkan media lokal tidak mempunyai kemandirian dalam pemberitaan. Pada akhirnya yang dirugikan adalah khlayak yang menghendaki media lokal mampu memberikan informasi yang transparan demi kesejahteraan.

Faktor lain yang menghambat peran media lokal adalah kekuatan kelompok – kelompok di masyarakat yang memiliki otoritas dalam mempengaruhi opini publik. Jika suatu kelompok tidak sejalan dengan pemberitaan media, bukan mustahil menggunakan cara sendiri untuk menekan media lokal agar mengikuti model pemberitaan yang dikehendaki. Ini jelas berbahaya dalam konteks pers bebas yang menjunjung tinggi independensi dan keberimbangan.

Pada konteks ini, bukan berarti media menghadapi masalah hanya dengan entitas diluar media, tetapi secara internal dalam tubuh media lokal juga menghadapi potensial yang menghambat jalannya pers bebas dan independen. Misalnya, para jurnalis media sudah berupaya bersikap profesional dalam menkonstruksi berita, tetapi tidak selamanya bisa disepakati oleh pemilik media. Dampaknya, pemberitaan pun bisa tidak faktual, karena berbagai pertimbangan kepentingan bisnis dan keuangan media massa lokal.

Kompas.com tanggal 3 Januari 2011, “Riau, Negeri Para Hedonis?” mengungkapkan bahwa Koran terbitan Riau hanya berisi acara seremonial didanai uang rakyat dari APBD terpampang hampir pada semua koran terkemuka daerah. Acap kali isi sebuah koran didominasi acara-acara seremonial belaka.

(<http://regional.kompas.com/read/2011/01/03/10114531/Riau..Negeri.Para.Hedonis-5> (akses 13 April 2011)

Padahal, media massa lokal seharusnya berpihak kepada kepentingan masyarakat bukan kepada para pemegang kekuasaan ataupun pemilik modal di daerah yang mementingkan berita seremonial. Media selayaknya menyuarakan sistem demokrasi dalam pemerintahan, yang memberikan kekuatan kepada kelompok yang terpinggirkan dan bertindak sebagai agen perubahan menuju masyarakat adil sejahtera tanpa sekat perbedaan sosial, ekonomi dan politik.

Oleh sebab itu, media lokal harus berani mengkritisi pemerintah daerah beserta sub-ordinat kekuasaannya. Media juga harus memaparkan fakta jika para pemilik modal melakukan tindakan penyelewengan yang merugikan masyarakat. Namun, persoalannya masih saja ditemui media lokal yang cenderung mendukung kekuasaan daripada berpihak pada rakyat.

Pada hakikatnya, kebebasan informasi, dan demokratisasi komunikasi dapat berjalan dengan baik, serta konflik antara media lokal dengan pemerintah dapat dihindari, jika masing-masing pihak merujuk pada UU No.40/ 1999 dan UU No. 32/ 2002. Namun demikian media lokal juga harus konsisten menjalankan etika profesi, dengan memberikan ruang seimbang, antara pemerintah sebagai pemegang kekuasaan daerah dan masyarakat.

Simpulan

Menjalankan fungsi media dengan baik, sesuai harapan masyarakat dalam menjalankan demokrasi tidak mudah meskipun sudah didukung oleh peraturan yang memadai. Sebab pada satu sisi masyarakat masih terbelenggu oleh budaya komunikasi paternalistik, yang memposisikan kelompok dominan, dalam pemerintahan lokal atau bisa mengontrol informasi. Akibatnya, pemberitaan media yang sesungguhnya sudah sejalan dengan karakteristik kebebasan pers, justru diposisikan menganggu kepentingan masyarakat lokal dan pemerintahan di daerah.

Dengan demikian, ketika kebebasan pers menjadi acuan, media lokal juga harus tetap menjunjung tinggi etika pemberitaan. Sebab khalayak semakin kritis dalam menyikapi kebebasan berekspresi, dengan menuntut keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan demokrasi pemerintahan di daerah yang berpihak kepada rakyat.

Namun masalahnya, elite dalam pemerintahan, elite politik maupun sejumlah entitas di masyarakat, seringkali berlindung dibalik demokrasi integralistik, yang ditafsirkan secara sepihak. Ketika untuk menolak transparansi pemberitaan media lokal. Akibatnya, yang dihadapi media massa di daerah, bukan sebatas problem profesionalisme dan pendanaan, tetapi terkait pula dengan karakteristik masyarakat yang belum sepenuhnya mau menerima pers bebas dengan segala implikasi positif maupun negatif.

Karena itu, tidak mudah bagi media lokal untuk, meletakkan nilai demokratisasi dalam kehidupan pemerintahan di daerah. Padahal, idealnya media lokal mampu mendorong berkembangnya demokratisasi dalam penyelenggaraan kekuasaan di daerah, tanpa kekhawatiran terhadap tekanan sejumlah kelompok yang memiliki kekuatan di masyarakat. Di pihak lain, media lokal juga harus menjalankan fungsi pemberitaan maupun penyiaran yang transparan dan independen, demi tercapainya demokratisasi pemerintahan di daerah, yang mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

Daftar Pustaka

- Craft, John E, Frederic A. Light and Donald G. Godfrey, 2001, *Electronic Media*, Wadsworth Thomson Learning, Australia.
- Delia, Jesse G ,1987, *Communication Research : A History*, dalam Charles R. Berger (ed), 1987, *Handbook of Communication*, Sage Publication, California Newbury.
- Gordon, Joy C, Tina Deines, and Jacqueline Havice, 2010, *Global Warming Coverage in the Media : Trends in a Mexico City Newspaper*, dalam Susanna Hornig Priest (ed), 2010, *Science Communication*, Volume 32 Number 2, June 2010, Sage Publication, Manhattan.
- Haryanto, Ignatius, 2010, *Media di bawah Dominasi Modal : Ancaman Terhadap Hak atas Informasi*, dalam Majalah Azasi, Edisi Maret – April 2010.
- Jayaweera, Neville and Sarath Amunugama (eds), 1987, *Rethinking Development Communication : The Asia Mass Communication*, Kefford Press Pte Ltd Singapore
- Jebarus, Felix, 2011, *Pertarungan Kepentingan tentang Kebebasan Informasi (Syudi Dinamika Komunikasi Dalam Proses Penyusunan dan Pembahasan Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik)*, Disertasi tidak diterbitkan, Program Pascasarjana Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP UI, Depok.
- Kompas, 16 Juni 2011, survey Pengguna Internet.
- MacBride, Sean, 1980, *Communication and Society Today and Tomorrow : Many Voices One World*, Kogan Page, London
- Majalah Asasi, 1999, Analisa Dokumentasi Hak Asasi Manusia, Juni 1999, ELSAM, Jakarta

- Media Planning Guide Indonesia, 2008, *An Essential Tool for Everybody working in or with, the Media in Indonesia*, First Edition, A Publication of Perception Media/ PT. Strategi Komunindo, Jakarta
- McQuail, Denis, 1991, *Teori Komunikasi: Suatu Pengantar*, Terjemahan Agus Dharma & Aminuddin Ran, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- McQuail, Denis, 2010, *Mass Communication Theory*, Sage Publication, London
- Moleong, Lexi J, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit Remaja Rosda Karya, Bandung
- Novianti, Dewi, 2010, Bingkai Berita Kasus Dugaan Korupsi Aliran Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia pada detik.com dan Tempo Interaktif, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol 8, Nomor 2, Mei – Agustus 2010, Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UPN “Veteran” Yogyakarta, Yogyakarta.
- Rubin, Rebecca B, Alan M. Rubin, and Linda J. Piele, 2005, *Communication Research: Strategies and Source*, Thomson – Wadsworth, Belmont, CA
- Subiyakto, Henry, 2008, Analisis Isi, Manfaat, dan Metode Penelitiannya, dalam bagong Suyanto dan Sutinah (ed), 2008, *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan*, Penerbit Kencana, Jakarta
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Sumber Media Online

- <http://regional.kompas.com/read/2010/05/19/20321534/Pelanggaran.dalam.Pilkada.di.Kalbar>, Rabu, 12 Januari 2011
- <http://cetak.kompas.com/read/2008/02/22/12223420/bupati.manggarai.barat.bantah.dalangi.tindak.kekerasan.terhadap.wartawan>, Jumat, 14 Januari 2011
- <http://regional.kompas.com/read/2011/01/20/21375656/Upah.Jurnalis.di.Surabaya.Belum.Layak>, akses 10 April 2011
- <http://nasional.kompas.com/read/2011/02/09/22322463/Pers.Harus.Sensor.Diri.Sendiri>, akses, 11 April 2011
- <http://regional.kompas.com/read/2011/01/03/10114531/Riau..Negeri.Para.Hedonis-5>, akses 13 April 2011

Biodata

Dr. Eko Harry Susanto, M.Si

Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara Jakarta.

Ketua Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM) Pusat

Pendidikan:

1. S1 Ilmu Pemerintahan UGM Yogyakarta, Lulus Tahun 1981
2. S2 Ilmu Komunikasi UI Jakarta, Lulus Tahun 1996
3. S3 Ilmu Komunikasi Unpad Bandung, Lulus Januari Tahun 2004

Email :

ekoharry@yahoo.com

ekohs@centrin.net.id

www.ekoharrysusanto.wordpress.com